

8 Sektor Yang Dilakukan KPK Dalam Pencegahan Korupsi

Samarinda, - Di mulai nya pemukulan gong secara resmi oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi Rapat Koordinasi Kepala Daerah Se- Kalimantan Timur Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang di hadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Unsur Vertikal Provinsi, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah dan instansi terkait di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (9/3).

Dalam acara ini seluruh Bupati atau Walikota Se- Kalimantan Timur hadir di acara tersebut, apresiasi dari Hadi kepada Kepala Daerah yang hadiri.

Di kesempatan ini pula Hadi juga berpesan kepada Kepala Daerah Se - Kaltim, "tetap semangat yang luar biasa untuk membangun kaltim yang lebih baik, lebih sejahtera, aman dan lebih bersih dari korupsi, ucapnya.

Pemberantasan korupsi bisa dilakukan melalui upaya pencegahan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Banyak kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

Masyarakat dapat melihat jika tidak ada OTT yang dilakukan KPK. Jika tidak ada tindakan dari KPK maka KPK dianggap tidak bekerja atau lemah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini berkembang pesat dan berpengaruh terhadap opini publik dalam pemberantasan korupsi.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata juga mengatakan, "Di dalam Undang-Undang KPK yang terbaru itu sendiri ada sebuah Dewan Pengawas (Dewas) dengan tujuan agar komisioner para pegawai KPK yang melaksanakan tugas dan fungsinya tidak serampangan", jelasnya.



HumasSetdakabPPU



HumasSetkabPPU



WWW.BenuoTaka.Com



Dari survey yang dilakukan KPK hampir rata-rata 99 persen masih adanya gratifikasi yang dilakukan dan tidak ada nya transparansi yang dilakukan.

8 sektor atau program yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi melalui penganggaran, PBJ, Perizinan, penguatan aparat pengawasan internal pemerintah, manajemen aset, manajemen SDM, dana desa serta bekerja sama dengan BPK.

"Sebagai seorang kepala daerah laksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga melaksanakan tugas sebagai kepala daerah dengan amanah", tutup Alexander. Humas11

Survey yang di lakukan KPK lewat SMS melibatkan banyak pihak yaitu melalui pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, masyarakat yang terlibat dengan pemerintah, expert melalui BPK RI dan para pengamat kebijakan publik.



HumasSetdakabPPU



HumasSetkabPPU



WWW.BenuoTaka.Com